

**EFEKTIVITAS TUGAS NAZHIR SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 DI KACAMATAN
TAMPAN KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)**



MUHAMMAD YAZID

NIM: 10721000373

**PROGRAM S1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1434 H/2013 M**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Efektifitas Tugas Na hir Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Na hir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif (orang yang berwakaf) untuk di kelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004.

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana efektifitas tugas nazhir sebelum berlakunya Undang-undang No.41 tahun 2004 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, bagaimana efektifitas tugas nazhir setelah berlakunya Undang-undang No.41 tahun 2004 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang efektifitas tugas nazhir setelah berlakunya Undang-undang No.41 tahun 2004 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan mengambil lokasi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas tugas na hir dalam mengelola tanah wakaf setelah berlakunya Undang-undang No. 41 tahun 2004. Subjek dalam penelitian ini adalah na hir wakaf di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah efektifitas tugas na hir dalam mengelola tanah wakaf setelah berlakunya Undang-undang No. 41 tahun 2004. Populasi dalam penelitian ini adalah na hir, RT, RW, dan Tokoh Masyarakat yang berjumlah 24 orang, karena jumlah populasi yang sedikit maka penulis mengambil semuanya dijadikan sampel dalam penelitian ini, dan teknik pengumpulan data diambil dengan wawancara, angket, observasi, data yang telah terkumpul dalam penelitian ini diseleksi terlebih dahulu apakah datanya sudah lengkap dan sudah memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

Setelah melakukan penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh na hir di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih belum semuanya efektif, sebagian Na hir masih belum amanah dalam menjalankan tugas, meskipun ada sebagian kecil yang sudah melaksanakan dengan baik, minimnya pengetahuan dari pihak nazhir dan wakif terhadap berbagai peraturan yang menyangkut tugas, kewajiban dan hak-hak nazhir, selain dapat melanggar Hukum Islam dan juga dapat diperkarakan dengan peraturan Undang-undang No. 41 tahun 2004.

KATAPENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektifitas Tugas Nazhir Setelah Berlakunnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Di Kecamatan Tampan”**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai *uswatunhasanah* dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat, semoga dengan senantiasa bershalawat kita mendapatkan syafa'atnya, Amin.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan oleh kemampuan dan cakrawala berfikir penulis sendiri. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.

Di dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Ayahanda (Thabrani Misri. Alm) dan ibunda (Titin Sumarni), dan Semua keluarga Anandayang tercinta yang telah mengorbankan tenaga dan waktu untuk membiayai perkuliahan Ananda serta mendidik dan membimbing Ananda selama ini, sehingga sampai pada perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan, Ibu Dr. Hertina, M.Pd selaku Pembantu Dekan I, Bapak Moh. Kastulani, SH,MH selaku pembantu Dekan II dan Bapak Drs. Ahmad Darbi B, MA selaku Pembantu Dekan III fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
4. Bapak Drs. Yusron Sabili, M.Ag dan Bapak Drs. Zainal Arifin, MA selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ahwal al- Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan nasehat-nasehat serta saran-saran yang membuat penulis bersemangat hingga skripsi ini mampu diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak dan Ibu Dosen, serta karyawan/i di lingkungan Fakultas Syari'ah dn Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, khususnya di Jurusan Ahwal al-syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai hal.
7. Bapak/Ibu Pimpinan Perpustakaan UIN SUSKA Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.
8. Dr H. Roni Pahlevi yang telah memberikan fasilitas Rumah tempat kediaman Ananda selama menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU, dan teman-teman jurusan Ahwal al-Syakhsiyah khususnya angkatan 2007. Kalian saingan sehat Ku, dan sahabat Ku tersayang serta teman-teman di rumah. Kalian adalah sahabat, saudara dan sekaligus keluarga Ku yang telah memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan.
9. Spesial buat Juni Wati, S.Pd.I yang senantiasa setia membantu dan tidak pernah lelah menyemangati penulis serta memotivasi dan do'a yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan nilai yang sangat memuaskan.

Semoga amal dan kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini jauh dari

kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini selanjutnya.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berlindung agar usaha yang penulis lakukan mendapat ridha-Nya dan menjadi amal sholah serta berguna bagi penulis dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pekanbaru, 05 Juni 2013

Penulis

Muhammad Yazid

DAFTAR ISI

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... vii

PEDOMAN TRANSLETRAS..... viii

BAB I PENDAHULUAN

 a. Latar Belakang Masalah.....1

 b. Batasan Masalah 10

 c. Rumusan Masalah..... 11

 d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 11

 e. Metode Penelitian..... 12

 f. Sistematika Penulisan..... 14

Bab II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

 a. Letak Geografis dan Demografis..... 16

 b. Kondisi Penduduk..... 17

 c. Kondisi sosial Keagamaan..... 18

 d. Kondisi Pendidikan..... 19

Bab III Kenazhiran Menurut HukumIslam dan peraturan perundang-undangan

 a. Wakaf 22

 b. Nazhir..... 37

 c. Wakaf dan Kenazhiran Dalam Peundang-undangan..... 47

 d. Penerapan wakaf sesudah berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun
 2004..... 52

e. Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 61

Bab IV KENAZHIRAN WAKAF DI KECAMATAN TAMPAN KOTA
PEKANBARU..... 65

a. Bagaimana tugas nazhir sebelum sebelum barlakunya
Undang-undang no. 41 tahun 2004 di Kecamatan Tampan.....65

b. Bagaimana tugas nazhir sebelum sebelum barlakunya
Undang-undang no. 41 tahun 2004 di Kecamatan Tampan..... 68

c. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tugas nazhir
setelah barlakunya Undang-undang no. 41 tahun 2004
di Kecamatan Tampan..... 79

Bab V PENUTUP

a. Kesimpulan..... 83

b. Saran..... 84

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... ix

LAMPIRAN

BIOGRAFI

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1	: Rekapitulasi Jumlah Nazhir dan Tanah Wakaf Yang Terdaftar di KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	65
Tabel IV. 2	: Nama Pewakif, Jenis Wakaf, dan Jenis Bangunan.....	66
Tabel IV. 3	: Jawaban Para Nazhir Terhadap Pertanyaan Latar Belakang Pendidikan Yang Dimiliki.....	69
Tabel IV. 4	: Pendapat Para Nazhir Masjid Dalam Melaksanakan Pengadministrasian Harta Benda Wakaf.....	70
Tabel IV. 5	: Pendapat Para Nazhir Masjid Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf.....	71
Tabel IV. 6	: Pendapat Para Nazhir Tentang Tugas Dalam Mengembangkan Harta Benda Wakaf.....	72
Tabel IV. 7	: Pendapat Para Nazhir Dalam Pengawasan Harta Benda Wakaf.....	73
Tabel IV. 8	: Perlindungan Terhadap Harta Benda Wakaf.....	74
Tabel IV. 9	: Respon Nazhir Tentang Penyerahan Wakaf Disertai Dengan Surat Keterangan Wakaf.....	74
Tabel IV. 10	: Respon Para Nazhir Tentang Kendala Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf.....	75

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai waqaf maka hal penting yang harus diketahui adalah pengelola waqaf, yang dalam istilah perundang-undangan disebut Na hir, hal ini disebabkan karena berkembang atau tidaknya harta waqaf tergantung pada Na hir waqaf. Sebutan Na hir adalah berasal dari kata *na hira-yanzhuru* (يَنْذُر -) dengan arti menjaga atau mengurus. Sedangkan di dalam terminologi Na hir adalah orang yang disertai tugas kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta waqaf.¹

Wakaf bukan hanya merupakan shadaqah biasa, tetapi merupakan shadaqah yang memiliki nilai lebih daripada shadaqah-shadaqah lainnya. Shadaqah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal, selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti ibadah, pendidikan, dakwah, sosial, kesehatan dan lain-lain. Dalam sebuah HR. Bukhari dan Muslim sebagai berikut :

“Menceritakan kepadaku Yahya bin Ayyub, Qutaibah (Ibnu Sa'id), dan Ibnu Hujrin mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il (Ibnu Ja'far) dari al 'Allak dari ayahnya, dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali

¹ Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, (Jakarta: 2006), Cet. Ke-1, h. 57

dari tiga perkara : shadaqah Jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”.²

Dalam Islampun seseorang dianjurkan untuk menafkahkan sebagian harta benda miliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur“an yang sekaligus menjadi dasar hukum wakaf dalam QS. ali Imran (3): 92 sebagai berikut:



“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Danapa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”³

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwasanya Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menyisihkan dan merelakan sebagian harta yang dicintainya untuk dinafkahkan, karena itu merupakan sebuah kebaikan yang sempurna. Dengan demikian sebagai orang muslim tidaklahmengesampingkan ayat tersebut, tapi justru harus sebaliknya, yakni senantiasamelakukannya dengan baik sesuai dengan apa yang telah diperintahkannya.

Wakaf menurut bahasa Arab berarti “*al-habsu*”, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata itu berkembang menjadi “*habbasa*” dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerjawaqafa (*fi’il madhi*)- *yaqifu* (*fi’il mudhari’*)- *waqfan* (*isim masdar*) yang berarti berhenti atau berdiri, sedangkan wakaf menurut istilah syara’ adalah menahan yang mungkin diambil manfaatnya

²Imam Abi al Husain Muslim bin al Hujjaj bin Muslim, *Al Jami’ al Shahih al MushammaShahih Muslim*, Semarang: Toha Putra, Juz 3, t,th, h.73.
³Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur“an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung, 2005, h. 49.

tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (‘ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.⁴

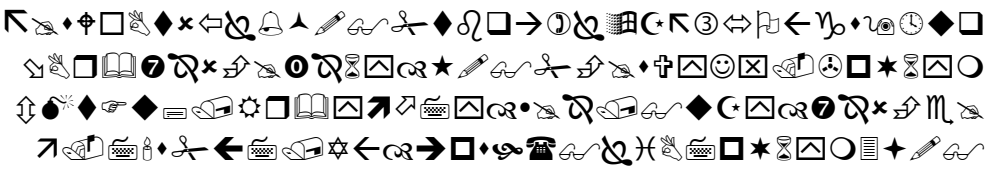
Waqaf merupakan kegiatan bermuamalah yang amat besar pahalanya, menurut ajaran Islam waqaf merupakan salah satu amalan yang termasuk pada amalan kategori istimewa dibandingkan dengan perbuatan lainnya. Karena waqaf bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan melaksanakan waqaf diharapkan akan bertambah ketakwaanya kepada Allah.⁵

Melaksanakan waqaf merupakan jalan-jalan kebaikan yang Allah sediakan bagi manusia adalah bersedekah dijalannya dengan harta yang dia cintai kepada orang lain, sedekah seperti ini sangat dianjurkan oleh agama, bahkan menjadi isyarat untuk memperoleh kebaikan sebagaimana firman Allah SWT di dalam QS. ali- ‘Imran (3):92



“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai”.

Di dalam QS.al-Baqarah (2):261 Allah juga berfirman:



⁴Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT,Raja Grafindo Persada, 1997, h. 23.
⁵*Ibid*, h. 2



“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”

Adapun definisi wakaf sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁶ Kemudian dengan adanya pertimbangan bahwa praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak dipelihara dan dikelola oleh nazhir sebagaimana mestinya.

Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.⁷

Waqaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun waqaf ada empat, yaitu:

1. *Waqif* (orang yang mewakafkan harta)
2. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
3. *Mauquf ‘alaih* (pihak yang diberi waqaf/peruntukan waqaf).

⁶Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: 2006, h. 2-3

⁷Departemen Agama RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya*, Jakarta: 2007, h. 39

4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewaqafkan sebagian harta bendanya)⁸.

Para mujtahid tidak menjadikan Na hir sebagai rukun waqaf, namun para ulama sepakat bahwa si waqif harus menunjuk Na hir waqaf. Pengangkatan Nah ir ini ditujukan agar harta waqaf tetap terjaga, terpelihara, dapat dikembangkan sehingga harta waqaf tidak sia-sia, dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan dapat berlangsung terus-menerus .

Sebagian besar tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk rumah ibadah, perguruan tinggi Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya.⁹ Mengingat manfaatnya yang sangat besar bagi kepentingan sosial, maka wakaf harus dikelola dan dikembangkan oleh orang-orang yang ahli di dalam menangani obyek wakaf serta mempunyai jaminan kepastian hukum. Berdasarkan kenyataan yang demikian, pemerintah memandang perlu diberikan landasan hukum yang kuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan obyek wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, menyatakan bahwa: “nazhir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia”¹⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 (4) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima benda wakaf, baik perorangan maupun badan

⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *op.cit*, h. 21

⁹ Departemen Agama RI, *Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, Jakarta: 2004, h. 1

¹⁰ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, Departemen Agama RI, *Peraturan-Perundangan Perwakafan*, Jakarta, 2006, h 8

hukum yang diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan, karena nazhir adalah ujung tombak perwakafan tanpa adanya nazhir peruntukan dan tujuan wakaf tidak akan tercapai. Dalam usaha untuk melestarikan dan mengembangkan objek wakaf Nazhir harus mengelola dan memelihara harta wakaf serta melaksanakan syarat dari wakaf.¹¹

Na hir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Menurut Asaf A.A. Fyzee mengatakan bahwa kewajiban Na hir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta waqaf, Na hir dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya.¹² Oleh karena itu Na hir dapat berupa Na hir perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Na hir sebagai pihak yang mengawasi dan memelihara waqaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta waqaf kecuali diizinkan oleh pengadilan, ketentuan ini sesuai dengan masalah kewarisan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan Na hir.¹³

Sehingga dengan demikian, keberadaan harta waqaf yang ada di tangan Na hir dapat dikelola dan diberdayakan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum Allah SWT.¹⁴

¹¹Departemen Agama RI, *opcit*, h. 39

¹²Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 5

¹³*Ibid*, h. 5

¹⁴*Ibid*, h. 69-70

Kehadiran Na hir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta waqaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan Na hir waqaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (Badan Hukum). Pengangkatan Na hir waqaf ini bertujuan agar harta waqaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta benda waqaf itu tidak sia-sia¹⁵.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dijelaskan Na hir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda waqaf¹⁶.

Dalam Kompilasi Hukum Islam diberikan pengertian bahwa Na hir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda waqaf. Mengenai tugas Na hir yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 220 antara lain :

- (1) Na hir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan perwakafan menurut ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Na hir diwajibkan membuat laporan secara berkala Kepada Kepala KUA dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama¹⁷.

¹⁵Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), Cet. Ke-5, h. 49

¹⁶PP No. 28 Tahun 1977, *Perwakafan Tanah Milik*, (Jakarta: Departemen Agama. 1977), Cet. Ke 1, h.1

¹⁷ IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, 2006), Cet. Ke-1, h. 128

Kemudian dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 disebutkan Na hir adalah pihak yang menerima harta benda waqaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya¹⁸. Berdasarkan pengertian tersebut Na hir dapat berupa perorangan, organisasi dan badan hukum seperti tercantum pada pasal 9 Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Kualifikasi profesionalisme Na hir secara umum dipersyaratkan menurut fiqh sebagai berikut, yaitu: beragama Islam, *mukallaf* (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), *baligh* (sudah dewasa) dan *'aqil* (berakal sehat), memiliki kemampuan dalam mengelola waqaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil.¹⁹

Menurut pasal 10 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi dan badan hukum, ketiga jenis nazhir ini memiliki persyaratan yang berbeda-beda pula pada umumnya:

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Na hir apabila memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Na hir apabila memenuhi persyaratan:

¹⁸ Depag RI, Undang- Undang RI No. 41 Tahun 2004, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), Cet. Ke-1, h. 3

¹⁹ Depag RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunaidi Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), Cet. Ke-5 h. 21-23

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Na hir perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Na hir apabila memenuhi persyaratan:
- a. Pengurus badan yang bersangkutan memenuhi persyaratan Na hir perseorangan.
 - b. Badan hukum Indonesia dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun mengenai tugas Na hir diatur pada pasal 11 yaitu:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda waqaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda waqaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda waqaf
- d. Melakukan pelaksanaan tugas kepada Badan Waqaf Indonesia.

Berdasarkan penjabaran sepintas dari tugas nazhir wakaf di atas ada perbedaan konsep wakaf dalam fiqh dan Undang-undang, jika dalam fiqh tugas nazhir tidak mengikat sehingga pelaksanaan tugas nazhir di Indonesia banyak bersifat alami dan kurang efektif untuk pengembangan dan fungsional bentuk wakaf aslinya Undang-undang perlu membuat aturan mengikat tentang tugas-tugas nazhir ini.

Dalam hal ini ada perbedaan antara sebelum diberlakukan Undang-undang dan sesudahnya, karena itu setelah delapan tahun belakunya Undang-undang ini adakah perubahan yang signifikan untuk tugas-tugas nazhir ini yang lebih baik. Untuk

meneliti permasalahan ini lebih rinci bagaimana keselarasan antara peraturan yang ada dengan aplikasi tugas Na hir dalam masyarakat dalam bentuk karya Ilmiah dengan judul “ **Efektifitas Tugas Na hir Setelah Berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.**”

B. Batasan Masalah

Persoalan kenazhiran di Indonesia adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari persoalan waqaf, karena waqaf berkaitan dengan harta benda waqaf kaum muslimin maka pembicaraan waqaf di Indonesia menjadi dua sisi, yaitu sisi fiqh dan sisi perundang- undangan. Dalam penelitian ini dibatasi hanya pada sisi perundang- undangan secara umum dan tekanannya pada peranan dan kedudukan na hir dalam mengurus persoalan perwakafan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas nazhir sebelum berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tugas nazhir setelah berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang tugas Nazhir Setelah Berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Di Kecamatan Tampan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Tugas Nazhir Sebelum Berlakunya Undang-undang No.41 Tahun 2004 di Kecamatan Taman.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tugas Nazhir Setelah Berlakunya Undang-undang No.41 Tahun 2004 di Kecamatan Taman.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam Tentang Tugas Nazhir Setelah Berlakunya Undang-undang No.41 Tahun 2004 di Kecamatan Taman.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam mendinamisasikan ilmu Syariat Islam khususnya dalam permasalahan waqaf.
- c. Untuk dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dalam rangka memperdalam studi yang sedang penulis tekuni dan para pembaca pada umumnya.
- d. Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan cakrawala berfikir bagi penulis.
- e. Untuk mempublikasikan keberadaan Nazhir di masyarakat sehingga harta waqaf terpelihara dan orang lain tertarik untuk berwaqaf.
- f. Untuk melindungi asset umat Islam yang diperoleh dari wakaf kaum muslimin.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan mengambil lokasi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Nazhir yang melaksanakan tugas dalam mengurus harta benda wakaf. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah efektifitas tugas Nazhir dalam mengelola harta benda tanah wakaf setelah berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Nazhir, RT, RW, dan tokoh masyarakat yang berjumlah 24 orang, karena jumlah populasi yang sedikit maka penulis mengambil semuanya dijadikan sampel dalam penelitian ini dengan metode *totalsampling*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yang menjadi data primer dalam skripsi ini adalah Undang-undang berikut penjelasannya, dan data yang diperoleh di lapangan.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber tambahan seperti buku-buku yang berhubungan dengan wakaf dan nazhir.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan.
- b. Angket, yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.
- c. Wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung pihak-pihak yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Pengolahan Data

a. Seleksi Data

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini diseleksi terlebih dahulu apakah datanya sudah lengkap dan sudah memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Klasifikasikan Data

Semua data yang terkumpul akan di klasifikasi sesuai jenisnya, kemudian akan disimpulkan (secara induktif) sebagai hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan ini, maka penulis menyusun secara sistematis dalam lima bab, yaitu sebagai berikut :

BABI :PENDAHULUAN

Babini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, MetodePenelitian, Sistematika Penulisan.

BABII :GAMBARAN UMUMLOKASI PENELITIAN

Yang meliputi letak gografis dandemografis,kondisi penduduk, kondisi sosial keagamaan, kondisi pendidikan.

BABIII:WAKAF DAN KENAZHIRAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Yang meliputi wakaf, nazhir, wakaf dan kenazhiran dalam perundang-undangan, penerapan wakaf sesudah berlakunya

Undang-undang No. 41 tahun 2004, wakaf menurut peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006.

BAB IV: KENAZHIRAN WAKAF DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Yang meliputi, tugas nazhir sebelum berlakunya undang-undang No. 41 tahun 2004 di Kecamatan Tampan, tugas nazhir setelah berlakunya undang-undang No. 41 tahun 2004 di Kecamatan Tampan, tinjauan hukum islam tentang tugas nazhir setelah berlakunya undang-undang No. 41 tahun 2004 di Kecamatan Tampan.

BAB V: PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografi dan Demografi

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP. No. 19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah $\pm 199.792 \text{ KM}^2$.¹

Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu :

1. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
2. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
3. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
4. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Jadi dari 4 (empat) Desa inilah Kecamatan Tampan ini terbentuk yang berdasarkan PP. No. 19 Tahun 1987 yang di atas tadi.

Seiring dengan perkembangan, pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2003, Wilayah Kecamatan Tampan di mekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar).

¹Dokumen Kantor Camat Tampan Kota Pekanbaru, Tanggal 10 Februari 2012

- c. Sebelah Utara berbatasanan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru).
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar).

Sehingga pada saat ini luas wilayah Kecamatan Tampan adalah ± 65 KM² yang terdiri dari 4 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Tuah Karya
3. Kelurahan Sidomulyo Barat
4. Kelurahan Delima

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan tanahnya datar dan sebagian lagi rawa-rawa, adapun jenis tanahnya adalah Agromosol, jenis tanah lain sangat cocok dipergunakan untuk pertanian.²

B. Kondisi Penduduk

Penduduk Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terbagi atas empat kelurahan, diantaranya Kelurahan Simpang Baru berjumlah 18.330 jiwa, dengan perincian menurut jenis kelamin, laki-laki 9.285 jiwa dan perempuan 9.045 jiwa. Kelurahan Sidomulyo Barat berjumlah 33233 jiwa, dengan perincian menurut jenis kelamin, laki-laki 17.138 jiwa dan perempuan 16.095 jiwa. Kelurahan Tuah Karya berjumlah 38.812 jiwa, dengan perincian menurut jenis kelamin, laki-laki 19.142 jiwa dan perempuan 19.670 jiwa. Kelurahan Delima berjumlah 25.438 jiwa, dengan perincian menurut jenis kelamin, laki-laki 12.691 jiwa dan perempuan 12.747 jiwa.

C. Kondisi Sosial Keagamaan

²*Ibid.*

Masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Mayoritas menganut agama Islam.³ Dari data yang diperoleh diantaranya:

a. Kelurahan Simpang Baru

Jumlah masyarakat yang ada di Kelurahan Simpang Baru yang menganut agama Islam sebanyak 17.115 orang. Masyarakat yang menganut agama Khatolik sebanyak 461 orang. Masyarakat yang menganut Protestan sebanyak 620 orang. Masyarakat yang menganut agama Hindu 42 orang. Masyarakat yang menganut agama Budha sebanyak 92 orang.

b. Kelurahan Sidomulyo Barat

Jumlah masyarakat yang ada di Kelurahan Sidomulyo Barat yang menganut agama Islam sebanyak 30.649 orang. Masyarakat yang menganut agama Khatolik sebanyak 900 orang. Masyarakat yang menganut Protestan sebanyak 1.499 orang. Masyarakat yang menganut agama Hindu 35 orang. Masyarakat yang menganut agama Budha sebanyak 150 orang.

c. Kelurahan Tuah Karya

Jumlah masyarakat yang ada di Kelurahan Tuah Karya yang menganut agama Islam sebanyak 37.842 orang. Masyarakat yang menganut agama Khatolik sebanyak 216 orang. Masyarakat yang menganut Protestan sebanyak 722 orang. Masyarakat yang menganut agama Hindu 6 orang. Masyarakat yang menganut agama Budha sebanyak 26 orang.

d. Kelurahan Delima

Jumlah masyarakat yang ada di Kelurahan Simpang Baru yang menganut agama Islam sebanyak 37.842 orang. Masyarakat yang menganut agama Khatolik sebanyak 216 orang. Masyarakat yang menganut Protestan

³*Ibid.*

sebanyak 722 orang. Masyarakat yang menganut agama Hindu 6 orang.

Masyarakat yang menganut agama Budha sebanyak 26 orang.⁴

D. Kondisi Pendidikan

Masyarakat dilihat dari tingkat pendidikan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dari data yang diperoleh diantaranya:

- a. Kelurahan Simpang Baru
 1. Belum sekolah 1.774 orang
 2. Tidak tamat Sekolah Dasar 945 orang
 3. Tamat Sekolah Dasar 6.262 orang
 4. Tamat SLTP sederajat 4.262 orang
 5. Tamat SLTA sederajat 2.855 orang
 6. Tamat D1/21.012 orang
 7. Tamat Akademi/S1 845 orang
 8. Tamat S2 330 orang
 9. Tamat S3 45 orang
- b. Kelurahan Sidomulyo Barat
 1. Belum sekolah 6.861 orang
 2. Tidak tamat Sekolah Dasar sederajat 3,486 orang
 3. Tamat Sekolah Dasar 2.838 orang
 4. Tamat SLTP sederajat 2.225 orang
 5. Tamat SLTA sederajat 9.627 orang
 6. Tamat D1/21.745 orang
 7. Tamat Akademi/S1 6.294 orang
 8. Tamat S2 131 orang
 9. Tamat S3 26 orang⁵
- c. Kelurahan Simpang Baru
 1. Belum sekolah 3.887 orang
 2. Tidak tamat Sekolah Dasar 4.198 orang
 3. Tamat Sekolah Dasar 6.871 orang
 4. Tamat SLTP sederajat 6.966 orang

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

5. Tamat SLTA sederajat 10.762 orang
6. Tamat D1/24.450 orang
7. Tamat Akademi/S1 1.355 orang
8. Tamat S2 307 orang
9. Tamat S3 16 orang

d. Kelurahan Delima

1. Belum sekolah 3.887 orang
2. Tidak tamat Sekolah Dasar 4.198 orang
3. Tamat Sekolah Dasar 6.871 orang
4. Tamat SLTP sederajat 6.966 orang
5. Tamat SLTA sederajat 10.762 orang
6. Tamat D1/24.450 orang
7. Tamat Akademi/S1 1.355 orang
8. Tamat S2 307 orang
9. Tamat S3 16 orang

BAB III

WAKAF DAN KENAZHIRAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Wakaf

Perkataan *waqf* menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab وقف-يقف-وقف yang berarti ragu-ragu, berhenti, meletakkan, memahami, mencegah, menahan, mengatakan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan dan tetap berdiri.¹ Di dalam kepastasaan, sinonim *waqf* adalah *habs*, kata وقف على المال هو وقف sama artinya dengan حبس على وجهه yang artinya mewakafkan hartanya.²

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syaria'at.³

Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian,⁴ yaitu:

الوقف بمعنى التحبيس والتسبيل

“Wakaf, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah miliknya”.

¹Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawir Kamus Arab – Indonesia*, Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "al-Munawir", 1984, h. 1683

²Ali Mutohar, *Kamus Muthohar Arab – Indonesia*, Bandung : Mizan, 1005, h. 1231

³Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Wakaf*, Jakarta : Harvindo, 2005, h. 2

⁴Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h 1.

Sedangkan wakaf menurut istilah syara' dikemukakan oleh beberapa pendapat dari para ulama dan pakar keIslaman sebagai berikut:

a. Muhammad ibn Isma'il as-San'any menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, untuk disalurkan (hasilnya) pada suatu yang mubah.⁵

b. Dalam kitab Wahbah al-Zuhaili, terdapat 3 pengertian wakaf menurut beberapa madzhab:

1) Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.⁶

2) Menurut *jumhur* termasuk di dalamnya adalah dua sahabat Abu Hanifah, golongan Syafi'iyah, dan golongan Hanabilah mengatakan wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya, serta tetap 'ainnya (pokoknya) dengan cara memutus hak *tasaruf* pada kerabat dari orang yang berwakaf atau yang lainnya, dan dibelanjakan di jalan kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah Swt.⁷

3) Menurut golongan Malikiyah wakaf berarti pemilik harta menjadikannya manfaat barang yang dimiliki kepada para *mustahiq*, walaupun harta tersebut berupa benda yang disewakan, kemudian hasilnya diwakafkan. Hasil harta yang diwakafkan dapat berupa dirham.⁸

c. Muhammad Daud Ali

⁵Muhammad Ibnu Ismail as-San'any, *Subulus Salam, Juz III*, Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th, h.167

⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz II, Beirut : Dar al-Fikr, t.th, h.153-155

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.⁹

d.Kompilasi hukum Islam

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari miliknya dan melembaganya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰

Adanya perumusan pengertian wakaf yang dikemukakan oleh para ulama dan pakar keislaman, menunjukkan kepada kita betapa besarnya keragaman tentang pengertian wakaf. Meskipun berbeda dengan hasil redaksional, akan tetapi esensi dari pengertian wakaf tetaplah sama yakni wakaf adalah suatu tindakan atau penahanan terhadap harta kekayaan seseorang atau badan hukum dengan kekalnya benda tersebut untuk diambil manfaatnya guna untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harta yang diwakafkan haruslah :

- a. Benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak lekas musnah setelah dimanfaatkan.
- b. Lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf.
- c. Tidak dapat dialihkan kepihak lain, baik dengan jalan jual beli, hibah maupun diwariskan.

⁹Muhammad Daud Ali,*Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998, h. 80

¹⁰Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam pasal 21*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1966, h. 95

d. Untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam.¹¹

Maka wakaf menurut syara` berarti penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa'ah*) di jalan Allah. Yang dimaksud dengan menahan dzat (asal) benda adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya.¹² Sedangkan dalam buku-buku fikih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pula pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fikih adalah sebagai berikut :

Pertama, Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.¹³ Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafannya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Kedua, Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta

¹¹Muhammad Daud Ali, *op. cit*, h. 84

¹²Muhammad Jawad Mughniyah; penerjemah, Masykur A.B, dkk, *Fiqih Lima Madzhab: Edisi Lengkap*, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 1996), h. 635.

¹³Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, h.2.

tidakboleh menarik kembali wakafnya.¹⁴ Artinya adalah menjadikan manfaat suatu hartayang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepadaorang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuaidengan keinginan wakif. Perwakafan tersebut berlaku untuk suatu masa tertentu, dankarenannya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Ketiga, Madzhab Syafi'i yang terdiri dari beberapa ahli fiqih mendefinisikanwakaf dengan berbagai macam definisi, diantaranya adalah sebagai berikut¹⁵ :

- a. Imam Nawawi mendefinisikan wakaf dengan : “Menahan harta yang dapatdiambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dandigunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri pada Allah.”¹⁶
- b. Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan “Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan bendatersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untukhal-hal yang dibolehkan.”¹⁷
- c. Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf dengan : “Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan hartapemiliknya untuk hal yang dibolehkan.”¹⁸

¹⁴Departemen Agama,Fiqih Wakaf, h.2.

¹⁵ Muhammad Ubaid Abdullah al-Kubasyi, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama danTerlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf* ,(Jakarta : Iiman, 2003), h. 40.

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid*

d. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikannya dengan :
“Menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan hartanya tersebut.”¹⁹

Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materibendanya (*al-‘ain*) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan atau berkelanjutan.

Keempat, Ulama Hanabilah dalam hal ini Ibnu Qudamah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Kenazhiran dalam fiqh. Sedangkan definisi wakaf menurut PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dalam pasal 1 ayat (1) adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembaganya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta bendamiliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut Pasal 215 Buku III Tentang Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab I Ketentuan Umum menyebutkan bahwa definisi dari wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-

¹⁹*Ibid*

lamanyaguna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai denganajaran Islam.²⁰

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dasar hukum waqaf dalam Al-Quran diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur`an dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur`an

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, yaitu ayat Al-Qur`an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk berbuat baik kepada sesama. Ayat-ayat tersebut antara lain adalah QS. ali- Imran (3):92



“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

²⁰Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, *UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan (Dilengkapi dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 1995/1996), h. 277.

Para mufasir dalam memaknai dalam ayat tersebut berbeda-beda, Syahid Sayyid Qutub menafsirkan kebajikan yang sempurna,²¹ sedangkan Syekh Abu Bakar Al-Jaziri,²² dan Ibnu Katsir al-Dimasyqi,²³ memaknainya dengan pahala kebaikan yaitu surga. Mufasir Indonesia yakni M. Quraish Shihab mengatakan bahwa kata tersebut berarti keluasan dalam kebajikan, salah satunya yaitu dengan cara menginfakkan harta di jalan Allah.²⁴

Dari ayat ini dapat dilihat bahwa kebaikan akan tercapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Thalhah, ketika beliau mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Beirha, sebuah kebun yang terkenal. Maka, ayat tersebut kemudian menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.

Kemudian di dalam QS al-Imran (3):115



“Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, Maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menenerima pahala) nya; dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa.”

²¹Syahid Sayyid Qutub, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h.102.

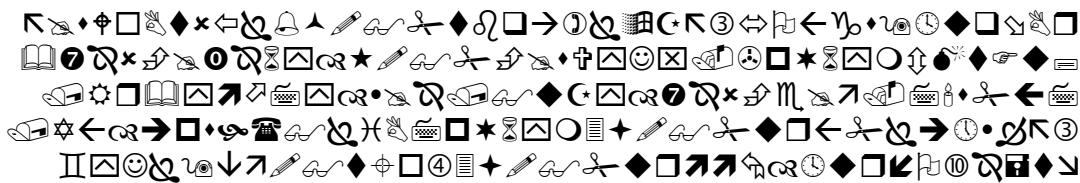
²²Syaikh Abu Bakar Al-Jaziri, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar jilid 2* (Jakarta : Darus Sunah, 2007), h. 142.

²³Ibnu Katsir al-Damsyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 4* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 200), h. 1.

²⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Ciputat : PT. Lentera Hati, 2000), h. 143.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa wakaf adalah salah satu diantara kebaikan-kebaikan, dan dipastikan barang siapa yang melakukan kebaikan dengan cara wakaf, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah.

Kemudian di dalam QS. al-Baqarah (2):261



“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa dengan berinfaq Allah akan melipatgandakan pahala tanpa perhitungan hisab bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya, menambahkan rizkinya tanpa seorangpun yang mengetahui batas-batasnya, memberikan rahmat-Nya yang tidak seorangpun yang mengetahui jangkauan ukurannya. Infaq yang dimaksud dalam ayat ini adalah infaq yang mengangkat derajat manusia, dan dapat juga diartikan sebagai wakaf. Jadi barang siapa yang berwakaf dengan niatan dan tujuan yang baik pasti akan dilipatgandakan pahalanya.

Kemudian di dalam QS. al-Baqarah (2): 267



“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Dalam ayat ini para ulama berselisih pendapat mengenai makna infaq, dimana sebagian ulama mengartikan infaq dalam ayat ini sebagai sedekah wajib (zakat) dan sebagian yang lain mengartikannya sebagai sedekah sunnah untuk kepentingan Islam secara umum. Walaupun berbeda dalam memaknai, akan tetapi keduanya tetap dalam koridor membela kepentingan orang Islam yang lain (sosial).

b. al-Hadits

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.

“Apabila anak adam (manusia) wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan, dan anak yang shaleh”²⁵

Adapun penafsiran sedekah jariyah dalam hadits tersebut bahwa dimana para ulama menafsirkan bahwa sedekah jariyah adalah wakaf.²⁶ Sebab bentuk sedekah seperti wakaf ini akan pahalanya akan terus mengalir, tidak akan terputus sekalipun orangnya telah meninggal.

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah SAW sedekah jariyah dengan wakaf. Kemudian sebuah hadits:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال : يا رسول الله اني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال له رسل الله صلى الله عليه وسلم "ان شئت حبست أصلها وتصدق بها" فتصدق عمر أنها لا يباع ولا تورث ولا تورث قل وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu Ia menghadap Rasulullah SAW untuk memohon

²⁵ Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al Fikr, 1992) Juz II, h. 70.

²⁶ Muhammad Ibn Ismail as- sana'ani, *op. cit.* h. 167

petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah SAW : Ya Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu, karena itu saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah SAW bersabda: jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya. Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi, Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu, dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut”²⁷

Jika kita cermati dari Nash-nash dan Hadits-hadits yang menjadi sumber wakaf, maka tampak sedikit sekali jika dibandingkan dengan aturan-aturan yang diterapkan berdasarkan ijtihad para fuqaha yang didasarkan pada pertimbangan istihsan, masalah dan ‘urf.²⁸

c. Rukunwakaf

Rukun berasal dari bahasa arab yang secara etimologi, rukun biasa diartikan bagian yang terpenting dari sesuatu. Adapun dalam terminologi fiqh, rukun adalah suatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Dengan kata lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.²⁹

Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu³⁰:

1. *Wakif* () atau orang yang mewakafkan.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.³¹ Adapun syarat *wakif* sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 ayat 1 Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

²⁷Nasa’i, *Sunan Nasa’i*, Juz. VI, Beirut : Dar al Fikr, 1415/1995. h. 233

²⁸*Istihsan, Masalahah*, dan ‘*Urf* ialah bagian dari metode penetapan hukum yang dikembangkan oleh para ulama fiqh.

²⁹Abdul Ghafur Anshori, *op. cit*, h. 93

³⁰Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, h.19.

2. *Mauquf* ()atau harta benda yang diwakafkan.

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah dan yang diwakafkan oleh *wakif*.³²

3. *Mauquf ‘alaih*(عليهموقف) atau tujuan wakaf.

Tujuan utama dari wakaf adalah diperuntukkan untuk kepentingan, dan untuk kebaikan mencari ridha Allah dan mendekatkan diri kepadanya.

4. *Shighat* (صيغة) atau pernyataan/ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkansebagian harta bendanya.

Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), untuk itu tidak diperlukan adanya *qobul* (penerimaan) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut.³³

Dalam buku-buku maupun Peraturan perundangan wakaf sebelum munculnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf tidak dicantumkan rukun wakaf mengenai adanya jangka waktu pelaksanaan wakaf, hal ini merupakan terobosan baru yang dilakukan pemerintah, mengingat manfaat wakaf pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan umat.

d.SyaratWakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan diatas, masing-masingmempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf,syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

³¹Depag, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, *op. cit*, h. 3

³²Departemen Agama, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan perundangan perwakafan*, *op. cit*, h. 3

³³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006, h. 62

1. *Waqif* (orang yang berwakaf) disyaratkan mempunyai kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (legal kompeten) dalam membelanjakan hartanya, kecakapan tersebut antara lain adalah merdeka, berakal sehat, dewasa, tidak berada di bawah pengampuan (boros atau lalai).

2. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:³⁴

1) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.

2) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

3) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif.

4) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.

3. *Nazhir* (pihak yang diberi wakaf / peruntukan wakaf).

Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, pertama tertentu (*mu'ayyan*) dan yang kedua tidak tertentu (*ghairu mu'ayyan*). Yang dimaksudkan dengan tertentu ialah jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci.

Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (*al-mawquf mu'ayyan*) bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta (*ahlan li al-tamlik*), Maka

³⁴ Muhammad Ubaid Abdullah al-Kubaysi, *op.cit*, h.247.

orang muslim, merdeka dan *kafir zimmi* yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ghaira mu'ayyan*; pertama ialah bahwa yang akan menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah, dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja.³⁵

4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif) sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Syarat-syarat shighat berkaitan dengan isi ucapan (*sighah*) perlu ada beberapa syarat, yaitu :

1) Ucapan itu harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya (*ta'bid*). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu.

2) Ucapan itu dapat direalisasikan segera, tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu.

3) Ucapan itu bersifat pasti.

4) Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.

Apabila semua persyaratan diatas dapat terpenuhi maka penguasaan atas wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tapi bersifat *ghaira tammah*.³⁶

³⁵http://www.republika.co.id/berita/29869/Pengertian_Wakaf (diakses pada tanggal 10 Agustus 2012, jam 17.30)

³⁶*Ibid*,

Dari syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas dapat diringkas seperti pendapat para ahli fiqh (*fuqaha*) yang telah menetapkan beberapa syarat wakaf berikut:³⁷

- 1) Menggunakan statemen yang pasti.
- 2) Menggunakan ungkapan yang bersifat mutlak.
- 3) Dengan statemen yang menunjukkan makna permanent atau kekal.
- 4) Kejelasan pihak yang berwakaf.
- 5) Tanpa syarat yang dapat menghilangkan tujuan wakaf.

B. Nazhir

Nazhir menurut bahasa Menjaga atau mengurus. Sedangkan di dalam terminologi Nazhir adalah orang yang disertai tugas kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta waqaf. Dari pengertian tersebut bahwa nazhir wakaf merupakan orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya siapa saja bisa menjadi nazhir selama mempunyai hak melakukan tindakan hukum.

Tugas dan kewajiban nazhir kewajiban nazhir ada beberapa hal yang dibebankan kepada nazhir, dimana nazhir wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisa terus dipertahankan, sehingga kemaslahatan *mauquf`alaih* bisa terpenuhi.

Dalam pembahasan berikut ini akan dijelaskan beberapa kewajiban nazhir yang paling utama³⁸:

- a. Pengelolaan dan pemeliharaan wakaf.

³⁷Muhammad Ubaid Abdullah al-Kubaysi, *op.cit*, h.148.

³⁸*Ibid*, h. 480.

Menurut Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, kewajiban utama bagi seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Karena mengabaikan pengelolaan dan pemeliharaannya akan berakibat pada kerusakan dan kehancuran, dan berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri. Para *fuqaha* bersepakat bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang nazhir adalah mengelola dan memeliharanya, baik dari pihak wakif itu mensyaratkan dalam bentuk tertulis maupun tidak.³⁹

b. Melaksanakan syarat dari wakif.

Nazhir diharuskan melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat dari wakifyang diakui secara hukum atau syarat yang di tulis saat serah terima wakaf danNazhir tidak boleh melanggarnya. Hal ini sejalan dengan Qaidah Fiqih yangberbunyi :

شرط الوقف كنص اشارة

“Syarat yang ditetapkan oleh wakif mempunyai kekuatan yang sama denganketetapan yang disebutkan secara jelas oleh Syari` (pembuat hukum, yaituAllah SWT)”.
 1

Maksud kaidah ini adalah bahwa syarat yang *shahih* dari wakif wajib dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar, kecuali dalam keadaan darurat atau terdapat masalah yang lebih utama, karena syarat tersebut mengungkapkan keinginan wakif dan tidak melanggar prinsip wakaf, tidak bertentangan dengan hukum wakaf, bahkan sejalan dengan hukum wakaf, tidak

³⁹*Ibid*, h. 481

menghambatkemaslahatan (manfaat) wakaf atau *mauquf `alaih* (yang diberi wakaf) dan tidakmengandung pelanggaran atas Syariat.

c. Membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf.

Wakaf sebagai aktivitas yang diakui dalam hukum dan agama dapatmeyebabkan suatu ikatan atau hubungan resmi dengan pihak lain, baik orang itumustahik, atau mereka yang terus terang dan melampaui batas dalam mengambilhasil dan manfaat harta wakaf. Sehingga berkemungkinan munculnyapersengketaan.

Oleh karena itu, nazhir sebagai pengelola dan pemegang amanat wakaf harusberusaha sekuat tenaga dalam menjaga keberlangsungan wakaf dan hak-hak darimereka yang berhak menerimanya. Berkaitan dengan ini, bahwatugas dari nazhir adalah menjaga keberadaan harta wakaf, membangun danmengembangkannya, menyewakan, menanam dan membela kepentingannya (dipengadilan).⁴⁰

d. Melunasi hutang wakaf.

Nazhir berkewajiban melunasi segala hutang yang berkaitan dengan hartawakaf yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf tersebut.Pelunasan hutang harus didahulukan daripada pembagian hasil kepada paramustahik. Karena apabila hutang belum lunas atau ditunda-tunda akan berakibatpada status harta wakaf itu sendiri, sehingga tidak bertambah dan berkembang,bahkan terancam akan hilang.

Selanjutnya akan berakibat tidak terpenuhinyabagian atau hakpara mustahik.Hutang-hutang yang dimaksudkan diatas adalah dapat berupa pajak yangharus dibayar pada pemerintah daerah, materi dan biaya persidangan, gaji

⁴⁰Muhammad Ubaid Abdullah al-Kubaisyi, *Muntaha Al-Iradat*, Muthba'ah al- Irsyad, 1977, h. 495

parapengacara yang telah bekerja dalam mempertahankan harta wakaf, atau hutang-hutang untuk biaya perawatan harta wakaf.⁴¹

e. Menunaikan hak-hak mustahik dari harta wakaf.

Nazhir harus menunaikan dan menyerahkan hak-hak mustahik dari hartawakaf dan tidak boleh menunda-nunda sedikitpun., kecuali terjadi sesuatu yang mengakibatkan pembagian tersebut tertunda. Sedangkan besarnya pemberian hasil harta wakaf kepada para mustahik harus berdasarkan ketentuan wakif. Dalam hal ini nazhir harus memperhatikan syarat wakif yang berkaitan dengan penambahan, pengurangan, pendahuluan dan pengakhiran bagi para mustahik. Karena syarat-syarat wakif adalah sah.⁴²

Wewenang nazhir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan oleh wakif. Sebagai pemegang amanat pada dasarnya nazhir tidak dibebani resiko yang terjadi atas harta wakaf, kecuali apabila kerusakan itu terjadi karena kelalaian atau bahkan kesengajaan nazhir sendiri.⁴³ Hal-hal yang boleh dilakukan oleh nazhir dalam mengelola harta wakaf adalah sebagai berikut :⁴⁴

a. Menyewakan harta wakaf.

Nazhir berwenang untuk menyewakan harta wakaf apabila menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Karena untuk membiayai hal-hal yang ditentukan oleh wakif atau untuk kepentingan wakaf dan penerima wakaf, misalnya untuk membangun,

⁴¹Muhammad Ubaid Abdullah al-Kubaisyi , *op.cit*, h. 489

⁴²*Ibid*, h.490

⁴³Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999) , h. 33-34

⁴⁴Al-Kabisi, *Loc.cit*

mengembangkan, ataupun untuk memperbaiki kerusakannya. Nazhir mempunyai hak untuk menyewakan harta wakaf karena nazhir mempunyai hak perwalian khusus, dimana hak perwalian khusus ini lebih diprioritaskan daripada hak perwalian umum yang dimiliki oleh hakim.

b. Menanami tanah wakaf.

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fikih tidak mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dimengerti karena wakaf adalah perbuatan *tabarru'*. Namun demikian memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka nazhir sangat diperlukan.⁴⁵

Nazhir diperbolehkan memanfaatkan tanah wakaf dengan cara menanaminya dengan aneka jenis tanaman perkebunan tentunya dengan memperhatikan dampaknya pada tanah wakaf dan kepentingan para mustahik. Apabila dalam akad wakaf tidak disebutkan tentang penyewaan, tetapi nazhir memandang perlu untuk menyewakan atau menanami tanah tersebut, menurut Abu Ja'far jika tindakan tersebut mendatangkan hasil bagi harta wakaf dan bermanfaat bagi fakir miskin, maka boleh dilakukan.

c. Membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan.

Nazhir juga berwenang mengubah tanah wakaf yang letaknya berdekatan dengan kota menjadi bangunan berupa gedung untuk disewakan dengan syarat :

Adanya kemauan dan kebutuhan masyarakat untuk menyewa gedung tersebut, dan keuntungan yang didapat dari hasil sewa bangunan lebih besar daripada digunakan untuk lahan pertanian.

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Cet. 1,

d. Mengubah kondisi harta wakaf.

Nazhir dalam Undang-undang wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting, disamping harus dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir juga dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf selama wakif tidak menentukannya dan bilamana wakif juga sepakat dengan peruntukan harta benda wakaf yang diajukan oleh nazhir.⁴⁶

Nazhir berhak mengubah keadaan dan bentuk harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik, apabila nazhir menghendakinya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kondisi harta wakaf dan kebutuhan penerima wakaf, dengan demikian maka dapat dipadukan antara pelaksanaan syarat dari wakif dan tujuan dari wakaf.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa perwakafan bertujuan untuk memanfaatkan sesuatu baik untuk kepentingan ibadah maupun sosial, dan disyaratkan agar harta yang diwakafkan haruslah benda yang mempunyai nilai manfaat dan sifatnya kekal.⁴⁷ Akan tetapi jika melihat realita yang ada bahwa tidak semua dari benda yang diwakafkan itu kekal zatnya, contohnya saja kayu untuk bangunan masjid, jendela, atau perlengkapan bangunan lainnya yang dimungkinkan akan kerusakannya suatu saat yang akan datang.

Sedangkan di dalam hadits Rasulullah dijelaskan bahwa benda asal atau pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan/ dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Permasalahannya adalah apabila suatu saat benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau sudah berkurang manfaatnya, kecuali dengan adanya perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk/sifat, memindahkan

⁴⁶Ahmad Rofiq, *op, cit*, h. 325

⁴⁷*Ibid.*

ketempat lain, atau menukar dengan benda lain, bolehkah perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut, mengingat pentingnya menjaga amanat wakif dan sisimanfaat harta wakaf tersebut. Drs. H. Suparman Usman dalam bukunya yang berjudul Hukum Perwakafan di Indonesia, menjelaskan beberapa pendapat dari para ulama-ulama, diantaranya pendapat yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan adanya perubahan.

a. Pendapat Yang Tidak Memperbolehkan atau Yang Melarang :

Dari golongan Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa apabila benda wakaf sudah tidak berfungsi (tidak dapat dipergunakan) atau kurang berfungsi, maka benda tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diganti / ditukar, tidak dipindahkan, tetapi benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaanya. Dasar pendapat tersebut adalah hadits yang dibawa oleh Ibnu Umar yang mengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.

Sejalan dengan itu, Abu Yusuf (murid Hanafi) juga berpendapat bahwa benda wakaf tidak boleh dijual dan menggunakan hasil penjualan tersebut, sedangkan Muhammad yang juga murid dari Hanafi berpendapat bahwa kalau benda tersebut sudah tidak berfungsi atau rusak, maka benda tersebut kembali kepada pemilik pertama atau wakif.

b. Pendapat Yang Memperbolehkan :

Berbeda dengan Syafi'i dan Maliki, para ahli fikih dari madzhab lain menyatakan bahwa berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat,

perubahantersebut dapat dilakukan.⁴⁸ Dasar pendapat ini adalah pandangan agar manfaat wakaf tetap terus berlangsung sebagai *shadaqah* jariyah, tidak *mubadzir* karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya.

Imam Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah membolehkan menjual, merobah, mengganti atau memindahkan benda wakaf yang sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi. Pendapat ini juga berdasarkan agar benda wakaf bisa berfungsi/ maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar/maslahat yang lebih baik bagi kepentingan manusia umumnya.

Ibnu Qudamah yang salah seorang ulama` madzhab Hanbali dalam kitabnya *al-Mughni* mengatakan bahwa apabila harta wakaf mengalami kerusakan sampai tidak dapat membawa manfaat sesuai dengan tujuannya hendaknya dijual, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli tersebut berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.

Dalam PP No. 28 Tahun 1977 menyatakan bahwa pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Tetapi sebagai pengecualian, dalam keadaan khusus penyimpangan dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yang alasannya meliputi :⁴⁹

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum.

Hukum menjual harta wakaf Para ulama` Imamiyah membagi wakaf menjadi dua jenis dengan tujuan untuk menentukan hukum dan akibatnya. Dua jenis tersebut adalah wakaf umum dan wakaf khusus. Wakaf umum adalah wakaf yang dikehendaki

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Adijani Al-Alibij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 40.

oleh pewakafnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum., misalnya saja madrasah, rumah sakit, Masjid, dan lain-lain. Sedangkan wakaf khusus yaitu wakaf yang menjadi milik penerimanya, misalnya saja wakaf barang tidak bergerak untuk keperluan Masjid.⁵⁰

Mengenai dua jenis wakaf tersebut, para ulama sepakat bahwa wakaf umum tidak boleh dijual dan diganti, walaupun rusak dan hampir roboh. Sedangkan wakaf khusus masih mengalami perbedaan pendapat sampai ada alasan yang memperbolehkan. Alasan diperbolehkan melakukan penjualan menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut⁵¹ :

- a. Apabila barang wakaf sudah tidak memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perwakafan.
- b. Apabila sudah tidak dibutuhkan lagi, tidak ada tempat lain yang sejenis menggunakannya, ada tempat tetapi tidak membutuhkannya, adanya kemungkinan menyia-nyiakannya apabila disimpan.
- c. Benda wakaf tersebut dalam keadaan rusak, misalnya rumah yang ambruk, atau tanah yang minim penghasilannya.
- d. Apabila pewakaf mensyaratkan kalau suatu saat terjadi sengketa, maka lebih baik dijual.
- e. Apabila terjadi sengketa antara pengurus wakaf yang dikhawatirkan akan menimbulkan korban jiwa dan harta dan persengketaan tersebut tidak mungkin bisa selesai kecuali dengan jalan menjualnya.
- f. Apabila dimungkinkan dengan menjual barang wakaf yang rusak dapat memperbaiki bagian lainnya dari hasil penjualan.

⁵⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab Edisi Lengkap* (Jakarta : Lentera, 1996), h. 671.

⁵¹Ibid, h. 674

- g. Apabila Masjid ambruk, maka benda yang menyertainya misalnya batu bata, jendela, pintu, dan lain-lain diperbolehkan dijual.

C. Wakaf Dan Kenazhiran Dalam Perundang- undangan

a. Menurut PP No. 28 Tahun 1977

Pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977 menetapkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, adapun kandungan meliputi:⁵²

1. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. (pasal 1 ayat 1).
2. Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya. (pasal 1 ayat 2)
3. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya. (pasal 1 ayat 3)
4. Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. (pasal 1 ayat 4)
5. Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf (pasal 2)⁵³
6. Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku (pasal 3 ayat 1)

⁵²Yayasan Piara, *Perwakafan Di Indonesia Sejarah Pemikiran Hukum* (Bandung:: Pengembangan Ilmu Agama Dan Humaniora, 1995), h. 63

⁵³*Ibid.* 64

7. Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara (pasal 4)
8. Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi (pasal 5 ayat 1)
9. Nazhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal 1 yang terdiri dari perorangan harus memenuhi syarat-syarat berikut: (pasal 7 ayat 1)
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Sudah dewasa;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Tidak berada dibawah pengampunan;
10. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
11. Jika berbentuk badan hukum, maka nazhir harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan; (pasal 7 ayat 2)

12. Nazhir yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapat pengesahan. (pasal 7 ayat 3)⁵⁴
13. Jumlah nazhir yang diperbolehkan untuk suatu daerah seperti dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan kebutuhan. (pasal 7 ayat 4)
14. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar wakaf. (pasal 9 ayat 1)
15. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti yang dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. (pasal 9 ayat 2)
16. Isi dan bentuk Ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. (pasal 9 ayat 3)
17. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. (pasal 9 ayat 4)
18. Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa surat dan menyerahkan kepada Pejabat tersebut dalam ayat (2) surat-surat berikut (pasal 9 ayat 5)
- a. Sertifikat hak milik atau tanda kepemilikan tanah lainnya;
 - b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa;
 - c. Surat keterangan pendaftaran tanah;

⁵⁴*Ibid.* 66

d. Izin dari Bupati atau Walikota/ Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.⁵⁵

19. Setelah Akta Ikrar Wakaf (AIW) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama nazhir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. (pasal 10 ayat 1)

20. Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya. (pasal 10 ayat 2)

21. Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatannya dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3). (pasal 10 ayat 3)

22. Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3). (pasal 10 ayat 4)⁵⁶

23. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka nazhir yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. (pasal 10 ayat 5)

b. Menurut Buku III Kompilasi Hukum Islam:

⁵⁵*Ibid.* 68

⁵⁶*Ibid.* 69

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. Tanda bukti kepemilikan harta benda;
 - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kepemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.⁵⁷

D. Penerapan Wakaf Sesudah Berlakunya Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah perwakafan, kenyataan menunjukkan bahwa dilihat dari tertibnya administrasi, perwakafan di Indonesia memang meningkat karena sudah cukup banyak tanah wakaf yang bersertifikat, akan tetapi dampaknya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat belum nampak. Hal ini barangkali karena wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tersebut hanya lahan milik, sedangkan wakaf dalam bentuk benda bergerak belum diatur. Karena benda-benda

⁵⁷*Ibid.* 70

bergerak di Indonesia belum ada peraturannya, maka perwakafan di Indonesia cukup sulit untuk dikembangkan, ditambah lagi kebanyakan nazhir wakaf juga kurang profesional dalam pengelolaan wakaf, sehingga mereka belum bisa mengembangkan wakaf secara produktif.⁵⁸

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang peneliti angkat, maka Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai undang-undang terbaru perlu untuk sebagai tambahan wawasan karena dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, undang-undang ini lebih lengkap, pasal-pasal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini antara lain sebagai berikut :⁵⁹

Pasal 1, Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.

⁵⁸ <http://abdullah-ubaid.blogspot.com/2012/11/membangkitkan-perwakafan-di-indonesia.html>

⁵⁹ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *op.cit*, h. 2

6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.⁶⁰
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

Pasal 2, Bahwa Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3, berbunyi bahwa Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Pasal 4, Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5, Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pasal 6, Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Pasal 7, Wakif meliputi :

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.⁶¹

⁶⁰*Ibid.* h. 3

Pasal 8, (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf hanya

dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. berakal sehat;
- c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pemilik sah harta benda wakaf.

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf bhanya

dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

(3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

chanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 9, Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 10, (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat

menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;

⁶¹*Ibid.* h. 4

- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :⁶²
- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratannazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. penguru badan hukum yang bersangkutan memenuhipersyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturanperundang.undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11, Nazhir mempunyai tugas:⁶³

- a. rnelakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengantujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

⁶²*Ibid.*h. 5

⁶³*Ibid.*h. 6

Pasal 12, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16, (1) Harta benda wakaf terdiri dari: a. benda tidak bergerak; dan b. benda bergerak.

- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:⁶⁴
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

⁶⁴*Ibid.* h. 7

- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17, (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18, Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.⁶⁵

Pasal 19, Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20, Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21, (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf .

- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama dan identitas Wakif;
- b. nama dan identitas Nazhir;
- c. data dan keterangan harta benda wakaf;

⁶⁵*Ibid.* 8

d. peruntukan harta benda wakaf;

e. jangka waktu wakaf .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22, Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e.kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangandengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Pasal 23, (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakafNazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yangdilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁶⁷

Pasal 36, Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenangdan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar ataudiubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

⁶⁷*Ibid.* 9

Paal 40, Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41, (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.⁶⁸

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

⁶⁸*Ibid.* 12

Pasal 42, Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.⁶⁹

Pasal 43, (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 42* dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

(3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44, (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

E. Menurut Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang Wakaf:

a. Wakaf untuk barang tidak bergerak

(1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:

⁶⁹*Ibid.* 13

Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;⁷⁰

- a. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
 - b. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
 - c. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dari sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
 - d. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.
- b. Wakaf Untuk barang bergerak selain uang
- PPAIW mendaftarkan AIW dari:
- a. Benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;
 - b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dari yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agraria setempat.

⁷⁰<file:///E:/Tata%20Cara%20Pelaksanaan%20Wakaf%20%C2%AB%20Nawz%E2%80%99s%20Blog.htm> , Kamis 13.30

- c. Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.⁷¹
- d. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
- e. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

c. Wakaf Untuk Uang

- a. LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
- b. Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.⁷²

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*

BAB IV

KENAZHIRAN WAKAF DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

A. Tugas Nazhir Sebelum Berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004

Berdasarkan jumlah asset wakaf dan Na hir wakaf, penulis dapat dari KUA Kecamatan Tampan kota Pekanbaru yang ada pada tahun 2010 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut:

TABEL IV. 1
REKAPITULASI JUMLAH NA HIR DAN TANAH WAQAF YANG
TERDAFTAR DI KUA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU
TAHUN 2010 M/ 1431 H ¹

No	Kelurahan/ Desa	Jumlah		Tahun	Jenis Barang	Luas Barang
		Na hir	Tanah Waqaf			
1	Kelurahan Tuah Karya	2	2	2010	Tanah	94,5 M ² 610 M ²
2	Kelurahan Sidomulyo Barat	2	2	2010	Tanah	586, 67 M ² 602 M ²
3	Kelurahan Delima	2	2	2010	Tanah	1,192 M ² 442, 75 M ²
4	Kelurahan Simpang Baru	2	2	2010	Tanah	329 M ² 1010 M ²
	Jumlah	8	8	-	-	3676,1 12 M ²

Berdasarkan rekapitulasi jumlah asset wakaf diatas bentuk tanah wakaf rata-rata di jadikan sebagai tempat peribadatan yaitu bangunan masjid, dan sarana pendidikan yaitu MDA di salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

¹Sumber dari: Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Tanggal 5 Februari 2012

Pembangunan ini sudah memiliki dokumen yang lengkap dan terdaftar di Kua Tampan pada tahun 2010.Berikut nama-nama pewakif dan jenis wakafnya dalam tabel dibawah ini.²

Tabel IV.2

No	Nama Pewakif	Jenis wakaf	Jenis Bangunan
1	Muhadjir	Sebidang tanah	Mushollah
2	Ridha Erwin Rivai, SE	Tanah	Masjid
3	A. Rivai Halim	Tanah	Musholla
4	HJ. Elisma	Tanah	Masjid
5	Aminah Suleman	Tanah	Masjid
6	H. Yusperdi, MT	Tanah	Masjid
7	Robiatun	Tanah	Sarana Pendidikan
8	Efendi	Tanah	Masjid

Dalam buku-buku maupun Peraturan Perundangan Wakaf sebelum munculnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak di cantumkan rukun wakaf mengenai adanya jangka waktu pelaksanaan wakaf, hal ini merupakan terobosan baru yang dilakukan pemerintah, mengingat manfaat wakaf pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan umat.

Jika dibandingkan tugas Nazhir yang terdapat dalam peraturan pemerintah No.28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-undang No.41 Tahun 2004 terdapat penambahan tugas nazhir, yaitu mengawasi harta benda wakaf, mengembangkan harta benda wakaf, dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang sebelumnya hanya berupa kewajiban untuk membuat laporan secara berkala dan laporannya hanya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

Dari data yang penulis peroleh dari KUA Tampan, Tanah yang diwakafkan sudah memiliki dokumen yang lengkap. Pada umumnya dalam pengelolaan tanah

²*Ibid.*

wakaf, wakif menyerahkan harta benda yang diwakafkan kepada orang yang dianggap sebagai panutan dalam masyarakat tertentu, disamping peran nazhir dalam mengelola harta wakaf tersebut. Dalam hal ini pengelolaan harta tanah wakaf tidak diserahkan langsung ke masyarakat, tetapi pengelolaan harta wakaf ini langsung berhubungan dengan wakifnya.

Oleh karena itu, dalam pengelolaan harta wakaf tidak dilepaskan kemasyarakat langsung, yang menjadi alasannya dikarenakan menjadi penyebab tidak optimalnya sasaran harta wakaf dikarenakan sempitnya pola pemahaman masyarakat terhadap harta wakaf yaitu harta yang tidak bergerak dan hanya untuk aspek peribadatan semata-mata.³

Tugas kenazhiran dalam pengelolaan tanah wakaf harus dilakukan dengan baik dan terarah. Dari data yang di peroleh oleh penulis, bahwa jumlah nazhir untuk satu tanah wakaf adalah satu orang dari masing-masing kelurahan yang ada di kecamatan Tampan. Sistem pengangkatan nazhir ini dilakukan dengan cara di daftarkan pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA Kecamatan setempat untuk memperoleh pengesahan dari kementrian hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴

Dalam sistem pengangkatan nazhir ini dilakukan oleh pengurus perserikatan BWI dalam menetapkan tugas nazhir sesuai dengan tujuan wakaf dengan masa bakti selama lima tahun. Bila mana menerima sesuai dengan tujuan wakif, maka Nazhir harus dapat melaksanakan tugasnya untuk memenuhi tujuan Wakif dalam satu tahun. Nazhir apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya

³H. Darwison, MA (Kepala KUA Kecamatan Tampan), *wawancara*, tanggal 5 Mei 2012.

⁴*Ibid.*

berhak mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menghentikan dan penggantian Nazhir. Namun demikian ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kepada Wakif atau ahli warisnya untuk mengganti sendiri tanpa melalui KUA dan Keputusan BWI.

B. Tugas Nazhir Setelah Berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004

Sesuai data yang di peroleh penulis dari KUA kecamatan Tampan dan data dari lapangan tentang latar belakang Pendidikan nazhir, bisa dilihat pada tabel dibawah ini⁵

TABEL IV. 3
JAWABAN PARA NA HIR TERHADAP PERTANYAAN LATAR
BELAKANG PENDIDIKAN YANG DIMILIKI

No	Alternatif	Frekuwensi	Persentase
1	SD, SLTP, SLTA	4	50%
2	SD, MTSN, MAN	-	0%
3	S1 Syari’ah	3	37,5%
4	S1 umum	1	12,5%
	Jumlah	8	100%

Pada tabel di atas dapat di lihat bahwa 50% dari jumlah responden mengatakan bahwa para Na hir memiliki latar belakang pendidikan umum sedangkan yang memiliki latar belakang pendidikan S1 umum 12,5%, walaupun demikian para Na hir yang berlatarkan pendidikan umum tersebut sudah mengetahui tentang ilmu agama (memiliki ilmu agama walaupun hanya diperoleh melalui ceramah agama/ pengajian).

⁵*Ibid*

sedangkan mengenai waktu penyerahan harta waqaf biasanya diserahkan dalam waktu yang tidak begitu terlalu lama kepada pihak pengurus pembangunan setelah pihak menerima harta waqaf dari pihak si Waqif. Sedangkan yang memiliki latar belakang agama pendidikan S1 Syariah 37,5%, para Na hir yang berlatarkan pendidikan agama tersebut sudah mengetahui ilmu agama dengan baik.

TABEL IV. 4
PENDAPAT PARA NA HIR MASJID DALAM MELAKSANAKAN
PENGADMINISTRASIAN HARTA BENDA WAQAF

No	Alternatif Jawaban	Frekuwensi	Persentase
1.	Sudah dilaksanakan sepenuhnya	6	75 %
2.	Sudah dilaksanakan sebagian	2	25 %
3.	Belum terlaksanakan	0	0%
Jumlah		8	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada umumnya jumlah Na hir yang mengisi angket menilai (75 %) para Na hir mengatakan telah melaksanakan tugasnya sepenuhnya dalam mengadministrasikan harta benda waqaf, sedangkan 25% dari mereka yang mengatakan sebagian Na hir sudah melaksanakan pengadministrasian, dan 0% belum terlaksana dari mereka tidak ada yang menjawab.

Dalam hal ini, Na hir mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan melakukan pengadministrasian sebagai Na hir masjid dan juga dalam pembangunan Masjid/ Mushalla, karena Na hir telah mempunyai konsep dan langkah-langkah sendiri untuk melanjutkan pembangunan tersebut.

Untuk mengetahui pendapat para Na hir Masjid dalam pengelolaan harta benda wakaf dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

TABEL IV. 5
PENDAPAT NA HIR MASJID DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF

No	Alternatif Jawaban	Frekuwensi	Persentase
1.	Sudah di kelola sepenuhnya	6	75%
2.	Sudah dikelola sebagian	2	25%
3.	Belum dikelola	0	0%
Jumlah		8	100%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada umumnya (75%) para Na hir mengaku telah mengelola harta benda waqaf sebagaimana mestinya, walaupun ada persepsi di kalangan masyarakat, bahwa jabatan Na hir hanyalah simbolis, hal itu dikarenakan pengetahuan masyarakat yang masih kurang tentang permasalahan waqaf dan Na hir itu sendiri. Perlu di tegaskan di sini, bahwa antara waqaf tanah dan proses pembangunan haruslah di pilah-pilah, dalam arti, pembangunan Masjid bukanlah paket atau bagian dari waqaf tanah.

Walaupun pembangunan Masjid tidak bisa dilanjutkan tanpa adanya tanah lokasi pembangunan Masjid itu sendiri, tetapi pembangunan Masjid adalah bagian lain dari waqaf tanah. Karena ketika tanah diwakafkan, si waqif tidak pernah menyinggung tentang sumbangan untuk pembangunan Masjid. Berbeda halnya

dengan waqaf sebidang lahan kebun karet, di mana hasilnya di harapkan untuk bisa diserahkan kepada fakir miskin atau orang-orang dan pihak yang berhak menerimanya, maka dalam hal ini sangat dibutuhkan dan perhatian para Na hir untuk memelihara dan mengelola harta waqaf, sehingga harta waqaf tetap lestari dan bisa dinikmati oleh pihak yang berhak menerimanya dalam waktu yang lama.

Dari pemaparan di atas, terlihat adanya perbedaan pandangan tentang tugas dan kinerja Na hir waqaf antara pihak Na hir sendiri dengan pihak pengurus Masjid. Peran Na hir di KUA Tampan hanya menerima harta benda waqaf dari si Waqif dan kemudian menyerahkannya kepada pihak pengurus pembangunan.

Dalam permasalahan ini, penulis berusaha mewawancarai para Na hir yang ada diKecamatan Tampan. Tugas Na hir adalah memelihara harta waqaf, dan dalam hal ini harta waqaf adalah tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan Masjid, dengan demikian, tugas Na hir hanyalah memastikan bahwa tanah tersebut sampai kepihak pengelola pembangunan, dalam hal ini adalah pengurus pembangunan.

Oleh karena itu, tidak ada kewajiban dan kewenangan Na hir untuk ikut dalam pengelolaan pembangunan karena pembangunan Masjid tersebut bukanlah bagian dari waqaf yang dilaporkan Ke Kantor Urusan Agama.⁶ Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pendapat para Na hir tentang pelaksanaan tugas yang telah di emban kepada mereka, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV. 6
PENDAPAT PARA NA HIR TENTANG TUGAS DALAM
MENGEMBANGKAN HARTA BENDA WAKAF

No	Alternatif Jawaban	Frekuwensi	Persentase
1.	Sudah dikembangkan	8	100%

⁶Johny Setiawan (Nazhir wakaf Masjid Al- Madani), *Wawancara*, Pekanbaru, 10 Mei 2012

	sepenuhnya		
2.	Sudah dikembangkan sebagian	0	0
3.	Belum dikembangkan	0	0
Jumlah		8	100%

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa (100%) dari jumlah responden mengatakan sudah mengembangkan harta benda waqaf sebagaimana mestinya, walaupun ada persepsi di kalangan masyarakat, bahwa jabatan Na hir hanyalah jabatan simbolis, hal itu dikarenakan pengetahuan masyarakat yang kurang tentang permasalahan waqaf dan Na hir itu sendiri. Maka dalam hal ini sangat di butuhkan peran dan perhatian para Na hir untuk memelihara dan mengelola harta wakaf, sehingga harta waqaf terjaga dan bisa di nikmati oleh pihak yang berhak menerimanya dalam waktu yang lama.⁷

TABELIV. 7
PENDAPAT PARA NA HIRDALAM PENGAWASAN HARTA BENDA WAQAF

No	Alternatif	Frekuwensi	Persentase
1	Ada diawasi	3	37, 5%
2	Tidak diawasi	5	62, 5%
	Jumlah	8	100%

Pada tabel di atas dapat di lihat bahwa pada umumnya 62,5% dari jumlah responden mengatakan yang mengisi angket menilai, bahwa Na hir dalam pengawasan harta benda wakaf di nilai masih kurang, sedangkan 37, 5% dari mereka mengatakan sebagian Na hir sudah mengawasi harta benda waqaf.

Dalam hal ini, peran Na hir di KUA Tampan hanyalah menerima harta waqaf dari si Waqif dan kemudian menyerahkannya kepada pihak pengurus pembangunan. Walaupun ada Na hir yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, maka itu di karenakan ia termasuk salah seorang pengurus pembangunan, seperti Bapak Hasan

⁷H. Rafles (Nazhir wakaf masjid Al-Ikhlas), *Wawancara*, Pekanbaru, 15 Mei 2012

basri.⁸ Jadi keterlibatannya dalam pelaksanaan pembangunan bukan atas nama Na hir, tetapi lebih dikarenakan jabatan beliau sebagai salah seorang pengurus.

TABEL IV. 8
PERLINDUNGAN TERHADAP HARTA BENDA WAQAF

No	Alternatif	Frekuwensi	Persentase
1	Sudah terdaftar di badan pertanahan	8	100%
2	Belum terdaftar di badan pertanahan	0	0%
	Jumlah	8	100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 100% dari jumlah responden mengatakan bahwa perlindungan terhadap harta benda waqaf sudah terdaftar di badan pertanahan. Hal ini, supaya harta benda tetap terjaga dan walaupun pembangunan masjid tidak bisa dilanjutkan tanpa adanya tanah lokasi pembangunan Masjid itu sendiri, tetapi pembangunan Masjid adalah bagian lain dari waqaf tanah. Jadi, pihak pengurus pembangunan Masjid/ Mushallah dapat melanjutkan pembangunan sehingga proses pembangunan Masjid/ Mushalla tersebut tidak mengalami kendala.

TABEL IV. 9
RESPON NAZHIRTENTANG PENYERAHAN WAQAF DISERTAI DENGAN SURAT KETERANGAN WAQAF

No	Alternatif	Frekuwensi	Persentase
1	Iya	8	100%
2	Tidak	0	0%
	Jumlah	8	100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa (100%) dari jumlah responden mengatakan bahwa harta waqaf diserahkan kepada pengurus Masjid sudah memiliki surat keterangan waqaf. Dari delapan Na hir yang di tunjuk mengelola harta benda waqaf sudah terdaftar di KUA Tampan.

TABEL IV. 10

⁸ Hasan Basri (Nazhir Wakaf Masjid Al- Muhajirin), *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Mei 2012

**RESPON PARA NA HIR TENTANG KENDALA DALAM MENGELOLA
HARTA BENDA WAQAF**

No	Alternatif	Frekuwensi	Persentase
1	Ada	6	75%
2	Tidak ada	2	25%
	Jumlah	8	100%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa (75%) dari jumlah Na hir mengatakan mengalami kendala dalam mengelola harta benda waqaf. Di mana dalam melaksanakan tugasnya terkadang Na hir mengalami kesulitan, hal ini karena kebanyakan harta benda waqaf berbentuk tanah dan pada umumnya tanahnya tersebut digunakan untuk membangun Masjid, sedangkan Na hir yang di tunjuk oleh Waqif ketika pembangunan atau pengelolaan Masjid tidak termasuk bagian dari pengurus. Sedangkan ia tidak bisa berbuat banyak pada hal di dalam Undang-undang yang dikeluarkan pemerintah dikatakan bahwa Na hir merupakan orang atau lembaga yang tugasnya mempertahankan serta mengembangkan harta waqaf.⁹

Didalam KHI Pasal 222 dijelaskanNazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukanberdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Dari beberapa penjelasan diatas dari data yang diperoleh dari lapangan, penulis juga memaparkan tentang gaji nazhir, dimana Rendahnya kepedulian nazhir dalam mengemban tugas kenazhiran, karena keberadaan nazhir dalam instrument perwakafantidak ditentukan uang saku/gaji didapatnya. Hal inipun akan menyebabkan nazhir wakaf enggan untuk mengurus wakaf yang ditugaskan kepadanya,sementara upahnya tidak ditentukan.

⁹Ramlan (Nazhir Wakaf Masjid Ukhwah), *Wawancara*, Pekanbaru, 13 Maret 2012

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan terlihat bahwa Na hiryang ada di Kecamatan Tampan yang belum menjalankan tugasnya sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang ataupun seperti pendapat para Ulama masih ada. Hal ini dapat disebabkan karena sebagian para Na hir yang telah ditentukan oleh si Waqif bukanlah orang-orang yang memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh agama, di mana sebagian Na hir 50% berlatar pendidikan umum, sementara Na hir yang berlatar belakang pendidikan S1 agama 37,5% dan Na hir yang berlatar belakang pendidikan S1 umum 12,5%, keadaan ini tentunya mempengaruhi Na hir dalam menjalankan tugas yang di emban sehingga Na hir dalam menjalankan tugasnya terkesan tidak biasa menjalankan tugas sebagai Na hir waqaf seperti harapan si Waqif.

Meskipun demikian, masih ada sebagian Na hir di Kecamatan Tampan yang melaksanakan tugas Na hir waqaf dengan baik (sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004).

Sebagaimana yang telah di bahas sebelumnya, bahwa di dalam pelaksanaan tugas Na hir di Kecamatan Tampan ada sebagian Na hir yang belum menjalankan amanah yang di embankan kepadanya dengan baik. Indikasi ini tercermin dari masih adanya Na hir yang hanya sekedar menjadi penerima benda waqaf dan tidak menjalankan tugasnya sebagai orang yang berhak mengelola dan memanfaatkan benda waqaf agar manfaat benda waqaf tersebut dapat dirasakan oleh orang banyak, ataupun tersalurkan kepada para *mustahiq* perhatikan dalam tabel IV.5 meskipun jumlahnya masih relatif atau cukup besar yakni 75% menurut pengakuan Na hir, kendatipun dalam prakteknya tidak diketahui secara jelas, dan kemungkinan besar dari pengakuan Na hir.

Tidak dipungkiri bahwa Na hir memiliki peranan yang sangat besar dalam mengelola harta waqaf karena ditangannyalah kewajiban itu dilakukan dengan baik dan benar. Untuk itu tidak berlebihan bila permasalahan ini mendapat sorotan yang besar dalam Undang-undang, sehingga diberikan ketentuan yang tegas. Masalah tugas Na hir dalam mengelola harta waqaf ini telah diatur dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 Bagian Kelima pada pasal 13 yang menyebutkan bahwa:

- (1)Na hir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 7 dan pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda waqaf.
- (2)Na hir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwaqafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Dengan demikian terlihat bahwa Na hir dalam pengelolaan harta waqaf memang harus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Bila tidak dilakukan dengan baik selain dapat melanggar hukum Islam sekaligus dapat diperkarakan dengan peraturan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Bagian pertama pada pasal 67, 68 tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif.

Ketentuan pidana pasal 67 sebagai berikut :

1. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda waqaf yang telah diwaqafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda waqaf yang telah diwaqafkan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana penjara paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda waqaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda waqaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ketentuan sanksi administrasi pasal 68 sebagai berikut :

1. Menteri dapat mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda waqaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 32.
2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang waqaf bagi lembaga keuangan syariah.
 - c. Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tugas Nazhir Setelah Berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004

Dalam Islam telah dianjurkan dengan jelas tentang bagaimana cara Na hir dalam melaksanakan tugasnya dalam harta waqaf, bahkan dalam peraturan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang waqaf di sana juga ditentukan tentang pelaksanaan tugas Na hir dalam melaksanakan harta waqaf. Para Na hir dituntut untuk sungguh-sungguh dalam menjalankan amanah yang telah dibebankan kepadanya, agar harta waqaf yang adiberikan oleh si Wakif bisa bermanfaat dan dapat dirasakan oleh orang banyak.

Pandangan hukum Islam pengelolaan waqaf oleh Na hir harus dilakukan dengan baik. Adapun pengelolaan waqaf dalam hukum Islam yang wajib dilakukan menurut ulama al- Kubaisy seperti yang dikutip dalam buku pola pembinaan lembaga pengelola waqaf (Na hir) yaitu mengembangkan waqaf, melaksanakan hak-hak waqaf dan menjaganya, menyalurkan keuangan waqaf dan menyampaikan hak-hak mustahiq waqaf.¹⁰

Disamping itu para ulama juga berpendapat bahwa Na hir juga bertugas mengawasi, memperbaiki (jika rusak), menanami dan mempertahankan waqaf oleh sebab itu harus mengelola harta waqaf itu secara baik dan hati-hati.¹¹

¹⁰Muhammad Ubaid Abdullah al-Kubaisy, *Ahkam al-Wqf fi Syari' at al-Islamiyah*, (Bagdad: Mthba'ah al-Irsyad, 1977), juz2, h. 187-203

¹¹Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat Fil al-Islam*, *Op.cit*, h. 216

tidak tertuju untuk menjelaskan masalah Na hir

a menunjuk pada syarat pemimpin, termasuk

“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Dalam ayat diatas dikatakan bahwa dalam memilih pemimpin (Na hir) setidaknya memperhatikan dua kriteria: *al-qawiyy* (kuat memiliki otoritas/kemampuan, baik keterampilan, intelektual, maupun emosional seperti kuat menghadapi resiko), dan *al-Amin*(terpercaya, kemampuan etis dan juga menejerial),¹²dalam menjalankan tugas yang dipikul.

Dalam Islam kata amanah menunjukkan pada kualitas ilmu, keterampilan, dan etis. Artinya yang amanah adalah seorang yang profesional yang mampu menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien serta mempunyai komitmen pada kode etik profesinya.¹³

Dengan begitu menurut penulis bahwa tugas Na hir dalam pengelolaan harta benda waqaf di KUA Kecamatan Tampan belum efektif sesuai dengan hukum Islam. Hukumnya (haram), hal ini menurut penulis karena sebagian Na hir masih belum amanah dalam menjalankan tugas sebagai Na hir sesuai yang diharapkan. Meskipun ada sebagian kecil yang sudah melaksanakan amanah dengan baik yang diberikan kepadanya untuk menjalankan tugas Na hir dalam mengelola dan memanfaatkan harta waqaf untuk kepentingan orang banyak, sehingga terhindar dari hal-hal yang memusnahkan harta waqaf.

¹²Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat wakaf Zakat dan Wakaf, *Pola pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf*, (Jakarta:2004 th), h. 83

¹³*Ibid*, h. 82

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian dan analisis data tentang efektifitas tugas Na hir setelah berlakunya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 di Kecamatan tampan kota Pekanbaru dapat di tarik kesimpulan bahwa pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Na hir KUA Kecamatan Tampan menurut penelitian yang penulis lakukan dimana para Na hir masih belum maksimal dengan baik dalam menjalankan tugas sebagai Na hir, dan juga tugas Na hir dalam pengelolaan harta benda waqaf di KUA Kecamatan Tampan belum efektif sesuai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 yang sudah ditetapkan dan hukum Islam. hal ini menurut penulis karena sebagian Na hir masih belum amanah dalam menjalankan tugas sebagai Na hir sesuai yang diharapkan.

Meskipun ada sebagian kecil yang sudah melaksanakan amanah dengan baik yang diberikan kepadanya untuk menjalankan tugas Na hir dalam mengelola dan memanfaatkan harta waqaf untuk kepentingan orang banyak, sehingga terhindar dari hal-hal yang memusnahkan harta waqaf.

Dengan demikian terlihat bahwa Na hir dalam pengelolaan harta waqaf memang harus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Bila tidak dilakukan dengan baik selain dapat melanggar hukum Islam sekaligus dapat diperkarakan dengan peraturan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Bagian pertama pada pasal 67, 68 tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif.

B. Saran

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada para Nazhir yang ada di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru terus meningkatkan kinerjanya sebagai Na hir waqaf dalam menjalankan tugas-tugas Na hir.
2. Diharapkan kepada Na hir waqaf dalam menjalankan tugasnya hendaknya sesuai dengan hukum syariat yang telah ditetapkan oleh agama Islam, dan juga disesuaikan dengan undang-undang perwakafan yang telah diatur oleh pemerintah sehingga tugas yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai yang diharapkan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan dan kesalahan, oleh karena itu untuk kesempurnaan skripsi ini diharapkan saran dari pembaca yang sifatnya membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis. Semoga Allah SWT meridhai. *Amin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT,Raja Grafindo Persada, 1997
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawir Kamus Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawir
- Ali Mutohar, *Kamus Muthohar Arab – Indonesia*, Bandung : Mizan, 1005
- Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Cet.1
- Adijani Al-Alibij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Departemen Agama RI, *BungaRampaiPerwakafan*, (Jakarta: 2006), Cet. Ke-1
- _____, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam,*Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: 2006
- _____, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya*, Jakarta: 2007
- _____, *Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, Jakarta: 2004
- _____,*ParadigmaBaruWakaf Di Indonesia*, (Jakarta:DirektoratPemberdayaanWakafdanDirektoratJenderalBimbingan Masyarakat Islam, 2007), Cet.Ke-5
- _____, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003
- _____, *Kompilasi Hukum Islam pasal 21*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,1966
- _____, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan AgamaIslam, *UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989Tentang Peradilan (Dilengkapi dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 1995/1996)
- _____, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat wakaf Zakat dan Wakaf, *Pola pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf*, (Jakarta:2004 th)

_____, Al- Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV Toha Putra, 1989

Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006

http://www.republika.co.id/berita/29869/Pengertian_Wakaf (diakses pada tanggal 10 Agustus 2012, jam 17.30)

<http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2004/41-04.pdf> (diakses tanggal 1 Juni 2012)

<http://abdullah-ubaidblogspot.com/2012/11/membangkitkan-perwakafan-di-indonesia.html>

Imam Abi al Husain Muslim bin al Hujjaj bin Muslim, *Al Jami' al Shahih al Mushamma Shahih Muslim*, Semarang: Toha Putra, Juz 3

Ibnu Katsir al-Damsyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 4* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2000)

IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: KaryaAnda, 2006), Cet. Ke-1

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, 2005

Muhammd Ibnu Ismail as-San'any, *Subulus Salam, Juz III*, Beirut : Dar al-Kitab al- Ilmiyah, t.th

Muhammad Ubaid Abdullah al-Kubaisyi, *Ahkam al-Wqf fi Syari' at al-Islamiyah*, (Bagdad: Mthba'ah al-Irsyad, 1977), juz2

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab Edisi Lengkap* (Jakarta : Lentera, 1996)

Muhammad Ubaid Abdullah al-Kubaisyi, *Muntaha Al-Iradat*, Muthba'ah al-Irsyad, 1977

Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al Fikr, 1992) Juz II

Muhammad Ubaid Abdullah al-Kubasyi, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta : Iman, 2003)

Muhammad Jawad Mughniyah; penerjemah, Masykur A.B, dkk, *Fiqih Lima Madzhab: Edisi Lengkap*, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 1996)

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998

Muhamnmad Ibnu Ismail as-San'any, *Subulus Salam, Juz III*, Beirut : Dar al-Kitab al- Ilmiyah, t.th

Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, Juz. VI, Beirut : Dar al Fikr, 1415/1995

PP No. 28 Tahun 1977, *Perwakafan Tanah Milik*, (Jakarta: Departemen Agama. 1977), Cet. Ke 1

Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqhi Al Islamy Wa-Adillatuh*, Mesir: Dar al-Fikri, tt, Juz8

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Ciputat : PT. Lentera Hati, 2000)

Syahid Sayyid Qutub, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001)